



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

Tahun Sidang	: 2024 – 2025
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 15
Jenis Rapat	: Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 10 September 2024
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Penyesuaian RKA-K/L Tahun 2025 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI, dan penetapan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2025
Ketua Rapat	: <b>H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Dahliya Bahnan, S.H., M.H./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 24 (dua puluh empat) Anggota Komisi II DPR RI dari 49 (empat puluh sembilan) Anggota Komisi II DPR RI/8 (delapan) fraksi dari 9 (sembilan) fraksi B. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI C. Kepala Badan Kepegawaian Negara D. Kepala Lembaga Administrasi Negara E. Kepala Arsip Nasional RI F. Kepala Ombudsman RI

**I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepala Lembaga Administrasi Negara, Kepala Arsip Nasional RI, dan Kepala Ombudsman RI, dengan agenda penyesuaian RKA-K/L Tahun 2025 sesuai hasil pembahasan Badan

Anggaran DPR RI, dan penetapan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2025, hari Selasa, 10 September 2024, dibuka pukul 11.37 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepala Lembaga Administrasi Negara, Kepala Arsip Nasional RI, dan Kepala Ombudsman RI, dengan agenda penyesuaian RKA-K/L Tahun 2025 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI, dan penetapan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2025, yaitu:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyampaikan:
  - a. Pagu Anggaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) tahun 2025 sebesar **Rp359.980.127.000,-** (*tiga ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah*), untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2025, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut:
    - 1) Program Dukungan Manajemen sebesar Rp251.084.807.000,- (*dua ratus lima puluh satu milyar delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu rupiah*);
    - 2) Program Kebijakan, Pembinaan Profesi dan Tata Kelola ASN sebesar Rp108.895.320.000,- (*seratus delapan milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*).
  - b. Usulan tambahan anggaran sebesar **Rp116.078.076.000,-** (*seratus enam belas milyar tujuh puluh delapan juta tujuh puluh enam ribu rupiah*).
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara menyampaikan:
  - a. Pagu Anggaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 2025 sebesar **Rp798.342.991.000,-** (*tujuh ratus sembilan puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*), untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2025, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut:
    - 1) Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 732.914.355.000,- (*tujuh ratus tiga puluh dua milyar sembilan ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah*);

- 2) Program Kebijakan, Pembinaan, Profesi, dan Tata Kelola ASN sebesar Rp65.428.636.000,- (*enam puluh lima milyar empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah*).
  - b. Usulan tambahan anggaran sebesar **Rp100.000.000.000,-** (*seratus milyar rupiah*).
3. Kepala Lembaga Administrasi Negara menyampaikan:
    - a. Pagu Anggaran Lembaga Administrasi Negara (LAN) tahun 2025 sebesar **Rp315.388.668.000,-** (*tiga ratus lima belas milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah*), untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2025, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut:
      - 1) Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 258.198.536.000,- (*dua ratus lima puluh delapan milyar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);
      - 2) Program Kebijakan, Pembinaan, Profesi, dan Tata Kelola ASN sebesar Rp57.190.132.000,- (*lima puluh tujuh milyar seratus sembilan puluh juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah*).
    - b. Usulan tambahan anggaran sebesar **Rp121.887.230.253,-** (*seratus dua puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah*).
  4. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia menyampaikan:
    - a. Pagu Anggaran Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) tahun 2025 sebesar **Rp251.995.636.000,-** (*dua ratus lima puluh satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah*), untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2025, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut:
      - 1) Program Dukungan Manajemen sebesar Rp201.825.697.000,- (*dua ratus satu milyar delapan ratus dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*);
      - 2) Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional sebesar Rp50.169.939.000,- (*lima puluh milyar seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*).
    - b. Usulan tambahan anggaran sebesar **Rp239.366.284.000,-** (*dua ratus tiga puluh sembilan milyar tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah*).
  5. Kepala Ombudsman Republik Indonesia menyampaikan:
    - a. Pagu Anggaran Ombudsman Republik Indonesia (ORI) tahun 2025 sebesar **Rp232.211.019.000,-** (*dua ratus tiga puluh dua milyar dua*

*ratus sebelas juta sembilan belas ribu rupiah*), untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2025, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut:

- 1) Program Dukungan Manajemen sebesar Rp187.329.019.000,- (*seratus delapan puluh tujuh milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan belas ribu rupiah*);
  - 2) Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebesar Rp44.882.000.000,- (*empat puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah*).
- b. Usulan tambahan anggaran sebesar **Rp201.728.215.000,-** (*dua ratus satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu rupiah*).

### III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan Rapat pada Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepala Lembaga Administrasi Negara, Kepala Arsip Nasional RI, dan Kepala Ombudsman RI, dengan agenda penyesuaian RKA-K/L Tahun 2025 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI, dan penetapan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2025, yaitu:

1. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) tahun 2025 sebesar **Rp359.980.127.000,-** (*tiga ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah*), untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2025, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut:
  - a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp251.084.807.000,- (*dua ratus lima puluh satu milyar delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu rupiah*);
  - b. Program Kebijakan, Pembinaan Profesi dan Tata Kelola ASN sebesar Rp108.895.320.000,- (*seratus delapan milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*).
2. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 2025 sebesar **Rp798.342.991.000,-** (*tujuh ratus sembilan puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*), untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2025, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut:

- a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 732.914.355.000,- *(tujuh ratus tiga puluh dua milyar sembilan ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)*;
  - b. Program Kebijakan, Pembinaan, Profesi, dan Tata Kelola ASN sebesar Rp65.428.636.000,- *(enam puluh lima milyar empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)*.
3. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Lembaga Administrasi Negara (LAN) tahun 2025 sebesar **Rp315.388.668.000,-** *(tiga ratus lima belas milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah)*, untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2025, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut:
- a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 258.198.536.000,- *(dua ratus lima puluh delapan milyar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)*;
  - b. Program Kebijakan, Pembinaan, Profesi, dan Tata Kelola ASN sebesar Rp57.190.132.000,- *(lima puluh tujuh milyar seratus sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah)*.
4. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) tahun 2025 sebesar **Rp251.995.636.000,-** *(dua ratus lima puluh satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)*, untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2025, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut:
- a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp201.825.697.000,- *(dua ratus satu milyar delapan ratus dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)*;
  - b. Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional sebesar Rp50.169.939.000,- *(lima puluh milyar seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)*.
5. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Ombudsman Republik Indonesia (ORI) tahun 2025 sebesar **Rp232.211.019.000,-** *(dua ratus tiga puluh dua milyar dua ratus sebelas juta sembilan belas ribu rupiah)*, untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2025, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut:
- a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp187.329.019.000,- *(seratus delapan puluh tujuh milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan belas ribu rupiah)*;

b. Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebesar Rp44.882.000.000,- (*empat puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah*).

6. Terhadap usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh:
- a. Kementerian PANRB sebesar **Rp116.078.076.000,-** (*seratus enam belas milyar tujuh puluh delapan juta tujuh puluh enam ribu rupiah*);
  - b. BKN sebesar **Rp100.000.000.000,-** (*seratus milyar rupiah*);
  - c. LAN sebesar **Rp121.887.230.253,-** (*seratus dua puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah*);
  - d. ANRI sebesar **Rp239.366.284.000,-** (*dua ratus tiga puluh sembilan milyar tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah*);
  - e. ORI sebesar **Rp201.728.215.000,-** (*dua ratus satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu rupiah*).

Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran tersebut, dan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk menambahkannya ke dalam pagu alokasi anggaran (pagu definitif) tahun 2025 masing-masing kementerian/lembaga tersebut melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR RI.

#### **IV. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 13.17 WIB.

**JAKARTA, 10 SEPTEMBER 2024**

**KETUA RAPAT**

**TTD**

**H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG**

**A-270**